STUDI KOMPARATIF PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI MELALUI PENGADILAN NIAGA DAN ARBITRASE

Rilda Murniati

ABSTRAK

Secara formal, alternatif penyelesaian sengketa bidang ekonomi dapat dilakukan melalui Pengadilan Niaga dan Arbitrase. Keduanya berbeda dari segi objek sengketa, tata cara dan akibat hukum penyelesaian sengketa. Dari segi objek sengketa persamaannya adalah Pengadilan Niaga dan Arbitrase menjadi pengadilan yang dapat menyelesaikan sengketa di bidang hak kekayaan intelektual sepanjang yang sudah ditentukan dalam UUHKI. Sedangkan perbedaannya adalah Arbitrase memiliki lingkup bidang yang luas meliputi segala bidang ekonomi yaitu perdagangan, keuangan, industri, perbankan, dan segala sesuatu yang menyangkut hak dari para pihak. Pengadilan Niaga hanya memiliki kewenangan di bidang HKI dan kepailitan serta penundaan kewajiban pembayaran hutang.

Kata Kunci: *Penyelesaian Sengketa Ekonomi, Pengadilan Niaga, Arbitrase*

A. PENDAHULUAN

Sengketa atau perselisihan di dalam berbagai kegiatan usaha di bidang ekonomi pada prinsipnya adalah sesuatu yang tidak diharapkan terjadi karena dapat mengakibatkan kerugian kepada pihak-pihak yang bersengketa tersebut. Oleh karena itu, terjadinya sengketa atau perselisihan di bidang ekonomi perlu dihindari untuk menjaga reputasi perusahaan tersebut di mata relasinya yaitu perusahaan lain yang melakukan hubungan dengan perusahaan tersebut atau konsumen pengguna produk perusahaan. Sengketa ekonomi akan menjadi masalah bahkan mengganggu kegiatan usaha perusahaan jika tidak dapat diselesaikan sendiri oleh para pihak secara damai. Untuk mengatasi hal tersebut, para pengusaha yang bersengketa berupaya mencari cara penyelesaian sengketa melalui lembaga penyelesaian sengketa yang dibentuk oleh negara. Negara melalui ketentuan peraturan perundangan-undangan telah menentukan beberapa lembaga penyelesaian sengketa. Pengadilan Negeri merupakan lembaga penyelesaian sengketa yang sering dipilih dalam penyelesaian sengketa bidang umum misalnya: masalah warisan, perceraian, harta bersama dan lain-lain. Namun demikian, saat ini untuk sengketa atau perselisihan di bidang ekonomi antar

perusahaan terdapat berbagai alternatif lembaga penyelesaian sengketa yang dapat dipilih dan telah memperoleh kepastian hukum melalui pengaturan dalam undang-undang. Secara formal, lembaga alternatif penyelesaian sengketa bidang ekonomi tersebut adalah Pengadilan Niaga dan Arbitrase.

Pengadilan Niaga lahir sebagai perangkat hukum penyelesaian sengketa di Indonesia untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif. Pengadilan Niaga lahir bersamaan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Peraturan kepailitan tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir perubahannya melalui Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat UU Kepailitan).

Berdasarkan Pasal 300 UU Kepailitan ditentukan bahwa selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan (ekonomi) yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang. Saat ini, undang-undang yang dimaksud dalam Pasal 300 UU Kepailitan telah ada yaitu Undang-Undang tentang Hak Kekayaan Intelektual, yaitu Undang-

Undang No. 5 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Undang-Undang bidang Hak Kekayaan Intelektual tersebut dengan tegas menyatakan bahwa Pengadilan Niaga sebagai pengadilan khusus yang berada di bawah lingkungan peradilan umum yang akan memeriksa dan memutus perkara Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut.

Selain Pengadilan Niaga sebagai lembaga peradilan umum, Undang-undang No.14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman telah menetapkan pula adanya lembaga penyelesaian sengketa di luar peradilan umum untuk dapat dijadikan sebagai alternatif oleh para pengusaha atau perusahaan dalam menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi lembaga Arbitrase. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut ditentukan bahwa penyelesaian sengketa perdata (termasuk juga sengketa perdagangan) di samping dapat diajukan ke pengadilan umum, juga terbuka kemungkinan diajukan melalui Arbitrase. Saat ini, telah lahir pula undang-undang yang secara khusus mengatur Arbitrase yaitu Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disingkat UU Arbitrase). Untuk itu, segala peraturan mengenai arbitrase yang ada sebelum berlakunya UU Arbitrase dinyatakan tidak berlaku.

Arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa ditunjuk oleh para pengusaha atau perusahaan berdasarkan kontrak yang telah dibuat sebelum terjadinya sengketa sebagai bagian dalam klausula pada *sales contract* atau perjanjian tersendiri yang dibuat atau disepakati setelah terjadi sengketa. Klausula arbitrase yang termuat dalam *sales contract* disebut *pactum de compromittendo* sedangkan perjanjian arbitrase yang dibuat dan disepakati kemudian setelah terjadi sengketa disebut akta kompromis.

Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penyelesaian sengketa ekonomi melalui Pengadilan Niaga dan Arbitrase? Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif,

pembahasan dilakukan secara komparatif dari segi: objek sengketa, prosedur, dan akibat hukum penyelesaian sengketa terhadap data skunder, analisis dilakukan secara kualitatif.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Objek Penyelesaian Sengketa

Objek sengketa itu secara rinci adalah bidang-bidang yang diatur undang-undang tentang kewenangannya dapat menerima setiap sengketa yang diajukan kepadanya. Dalam hubungan hukum perusahaan, biasanya para pengusaha telah menentukan atau menunjuk lembaga penyelesaian sengketa melalui perjanjian atau kontrak jika terjadi sengketa dari setiap hubungan hukum tersebut. Namun demikian, lembaga penyelesaian sengketa mana yang berwenang menyelesaikan sengketa tersebut adalah tergantung pada ketentuan undang-undang yang mengatur kewenangan sengketa yang diajukan.

Objek Sengketa pada Pengadilan Niaga

Dalam Pasal 300 UU Kepailitan ditentukan bahwa selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan (ekonomi) yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang. Realisasi dari ketentuan Pasal 300 UU Kepailitan tersebut adalah lahirnya beberapa Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual (UUHKI), yaitu: Undang-Undang UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (UUDI), UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Letak Sirkuit Terpadu (UUDLST), UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten (UUP), UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek (UUM), dan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC). Untuk itu, berikut ini akan diuraikan ketentuan UUHKI yang menentukan kewenangan Pengadilan Niaga terhadap objek sengketa yang terkait dengan bidang hak kekayaan intelektual. Pasal 46 Ayat (1) UUDI Bab VIII tentang Penyelesaian Sengketa, menentukan bahwa pemegang hak desain industri atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berupa: gugatan ganti

kerugian dan atau pemberhentian semua perbuatan yang diatur dalam Pasal 9. Selanjutnya, ditentukan bahwa gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Niaga.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UUDLST) menentukan kewenangan Pengadilan Niaga sebagai lembaga penyelesaian sengketa. Pasal 38 Ayat (1) UUDLST menentukan bahwa pemegang hak atau penerima hak desain tata letak sirkuit terpadu dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, berupa gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 UUDLST. Selanjutnya, ditentukan bahwa gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Niaga.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (UUP) menentukan pula tentang kewenangan Pengadilan Niaga terhadap setiap sengketa mengenai paten. Pasal 117 UUP menentukan bahwa jika suatu paten diberikan kepada pihak lain selain dari yang berhak, maka pihak yang berhak atas paten tersebut dapat menggugat kepada Pengadilan Niaga. Selanjutnya, Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek (UUM) menentukan bahwa pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis. Dalam Ayat (2) ditentukan bahwa gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga. Selanjutnya, Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC) menentukan kewenangan Pengadilan Niaga terhadap setiap sengketa yang timbul dalam bidang hak cipta. Pasal 56 Ayat (1) UUHC menentukan bahwa pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak cipta dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakannya ciptaan itu.

Berdasarkan uraian dan ketentuan pasal-pasal di atas, dapat dinyatakan bahwa Pengadilan Niaga memiliki kewenangan terhadap objek sengketa yang menyangkut bidang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang, dan bidang hak kekayaan intelektual yang sudah diatur dalam pasal-pasal UUHKI yaitu: desain industri,

desain tata letak sirkuit terpadu, paten, merek, dan hak cipta.

Objek Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase

UU Arbitrase telah menentukan objek sengketa apa saja yang dapat diajukan melalui arbitrase akan diuraikan berikut ini. Pasal 2 UU Arbitrase menentukan dengan tegas bahwa kewenangan arbitrase lahir dari penetapan atau kesepakatan para pihak yang bersengketa dalam suatu perjanjian tertulis. Dalam Pasal 5 Ayat (1) UU Arbitrase, ditentukan bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Selanjutnya, dalam Ayat (2) ditentukan bahwa sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian. Selanjutnya, penjelasan Pasal 66 huruf b UU Arbitrase menentukan bahwa "ruang lingkup hukum perdagangan dan mengenai hak" adalah kegiatan-kegiatan antara lain di bidang: perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, dan hak kekayaan intelektual.

UUHKI dalam setiap undang-undang yang mengatur tentang kewenangan Pengadilan Niaga sebagai lembaga penyelesaian sengketa menentukan pula adanya kewenangan Arbitrase sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dapat dipilih oleh para pihak yang bersengketa berdasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat sebelum atau setelah terjadinya sengketa. Oleh karena itu, penunjukan tersebut akan meniadakan kewenangan Pengadilan Niaga sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang ditunjuk undang-undang sampai proses Arbitrase selesai dilakukan.¹

UUHKI yang mengatur kewenangan arbitrase dalam setiap undang-undang yang sama kewenangan Pengadilan Niaga, namun ditentukan dalam pasal-pasal lain, yaitu: Pasal 47 UUD, Pasal 39 UU DTLST, Pasal 124 UUP, Pasal 84 UUM, dan Pasal 65 UUHC. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, pada prinsipnya semua pasal

¹ Priyatna Abdurasyid, 2002, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Fikahati Aneska, Jakarta. hlm. 93

tersebut menentukan bahwa selain penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Niaga, para pihak dapat menyelesaikan sengketa dalam bidang HKI tersebut melalui Arbitrase berdasarkan klausula atau perjanjian arbitrase.

Prosedur Penyelesaian Sengketa

Prosedur Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan Niaga

Prosedur penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual telah pula diatur dalam UUHKI dalam setiap bab penyelesaian sengketa dari masing-masing UUHKI tersebut. Pada prinsipnya prosedur penyelesaian sengketa yang diatur dalam masing-masing UUHKI tersebut adalah sama, sebagai berikut:

Pengajuan dan Pendaftaran Gugatan

Gugatan pembatalan/penolakan/penghapusan HKI dan pelanggaran HKI oleh pihak lain dapat diajukan ke Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat. Dalam hal tergugat, bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun demikian, sampai saat ini keberadaan Pengadilan Niaga di daerah baru ditemukan di Surabaya, Medan dan Makassar. Untuk itu, wilayah pengajuan permohonannya dilakukan pada Pengadilan Niaga di tempat terdekat dari tergugat. Gugatan yang masuk di Pengadilan Niaga, selanjutnya didaftarkan oleh Panitera. Panitera mendaftarkan gugatan pada tanggal gugatan itu diajukan dan paling lambat 2(dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan dan kemudian disampaikan kepada Ketua Pengadilan Niaga. Dalam jangka waktu paling lama 3(tiga) hari, Pengadilan Niaga mempelajari dan menetapkan hari sidang.

Pemeriksaan Sengketa di Pengadilan Niaga

Sidang pemeriksaan atas gugatan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah didaftarkan. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lambat 7(tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan. Berdasarkan UUHKI ditentukan bahwa pemeriksaan sengketa oleh Pengadilan

Niaga dilakukan menurut hukum acara perdata yang berlaku yaitu HIR dan RBg. Atas permintaan pihak yang dirugikan (penggugat) berdasarkan UUHKI maka pihak tersebut dapat pula meminta kepada hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara menghentikan perbuatan pelanggaran HKI yang merugikan pihak yang berhak atau pemegang atau penerima lisensi HKI tersebut.

Penetapan Putusan

Berdasarkan UUHKI, putusan atas gugatan sengketa HKI melalui Pengadilan Niaga harus sudah diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah pendaftaran gugatan dan dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Putusan atas gugatan tersebut harus memuat lengkap pertimbangan hukum dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Salinan putusan Pengadilan Niaga tersebut wajib pula disampaikan oleh juru sita kepada para pihak terkait paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pembacaan putusan.

Tata Cara Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase

Berdasarkan UU Arbitrase akan diuraikan tata cara penyelesaian sengketa melalui Arbitrase sebagai berikut:

Permohonan Arbitrase

Suatu sengketa dapat diselesaikan melalui Arbitrase apabila diajukan surat permohonan (pemberitahuan) penyelesaian sengketa kepada lembaga arbitrase terkait (Pasal 8 Ayat (1) UU Arbitrase). Surat permohonan tersebut akan didaftarkan di sekretariat lembaga arbitrase tersebut. Pasal 8 Ayat (2) UU Arbitrase menentukan pula bahwa surat permohonan atau pemberitahuan itu harus memuat dengan jelas: nama dan alamat para pihak; penunjukan kepada klausula atau perjanjian arbitrase yang berlaku; perjanjian atau masalah yang menjadi sengketa; dasar tuntutan atau jumlah yang dituntut, apabila ada; cara penyelesaian yang dikehendaki; perjanjian yang diadakan oleh para pihak tentang jumlah arbiter atau apabila tidak diadakan

perjanjian semacam itu, pemohon dapat mengajukan usul tentang jumlah arbiter yang dikehendaki dalam jumlah ganjil. Bersamaan dengan pengajuan permohonan tersebut, pemohon juga diwajibkan untuk memberitahukan kepada pihak termohon bahwa klausula arbitrase yang diadakan oleh kedua pihak telah diajukan ke lembaga Arbitrase.²

Penunjukan Arbiter

Penyelesaian sengketa pada lembaga Arbitrase dilakukan oleh Arbiter. Pasal 1 angka (7) UU Arbitrase menentukan bahwa Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh pengadilan negeri atau lembaga arbitrase untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui Arbitrase. Dalam Pasal 16 UU Arbitrase dinyatakan bahwa dengan ditunjuknya seorang Arbiter atau beberapa Arbiter (majelis arbitrase) oleh para pihak secara tertulis, maka para pihak dan Arbiter yang menerima penunjukan terjadi suatu perjanjian perdata. Selanjutnya, Pasal 19 UU Arbitrase menentukan bahwa dalam hal Arbiter telah menyatakan menerima, maka yang bersangkutan tidak dapat menarik diri kecuali atas persetujuan para pihak melalui perjanjian tertulis.

Penyampaian Surat Tuntutan

Pasal 38 UU Arbitrase menentukan bahwa dalam jangka waktu yang ditentukan Arbiter atau Majelis Arbitrase, Pemohon harus menyampaikan surat tuntutan kepada Arbiter atau Majelis Arbitrase yang telah ditetapkan. Setelah menerima surat tuntutan dari Pemohon, Arbiter atau Majelis Arbitrase menyampaikan 1(satu) salinan tuntutan tersebut kepada Termohon dengan disertai perintah bahwa Termohon harus menanggapi dan memberikan jawabannya secara tertulis dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat tersebut (Pasal 39 UU Arbitrase). Dalam hal Termohon setelah lewat 14 (empat belas) tidak menyampaikan jawabannya, Termohon akan dipanggil untuk menghadap di muka sidang Arbitrase yang ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari sejak

dikeluarkan perintah tersebut (Pasal 41 UU Arbitrase). Segera setelah menerima jawaban dari Termohon, atas perintah Arbiter atau Majelis Arbitrase salinan jawaban Termohon diserahkan kepada Pemohon. Segera setelah menerima jawaban dari Termohon, atas perintah Arbiter atau Majelis Arbitrase salinan jawaban Termohon diserahkan kepada Pemohon. Bersamaan dengan itu, Arbiter atau Ketua Majelis Arbitrase memerintahkan agar kedua belah pihak atau kuasa mereka untuk menghadap di muka sidang Arbitrase yang ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari sejak adanya surat perintah tersebut (Pasal 40 UU Arbitrase).

Proses Pemeriksaan Sengketa oleh Lembaga Arbitrase

Pasal 27 UU Arbitrase menentukan bahwa semua pemeriksaan sengketa oleh Arbiter atau Majelis Arbitrase dilakukan secara tertutup. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia dan para pihak dapat memilih bahasa lain (Pasal 28 UU Arbitrase). Para pihak yang bersengketa dapat pula diwakili oleh kuasanya dengan surat kuasa khusus (Pasal 29 UU Arbitrase). Pemeriksaan sengketa dalam Lembaga Arbitrase harus dilakukan secara tertulis. Pemeriksaan secara lisan dapat dilakukan apabila disetujui para pihak dan Arbiternya (Pasal 35 UU Arbitrase). Pemeriksaan sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Arbiter atau Majelis Arbitrase terbentuk. Apabila diperlukan atas persetujuan para pihak dapat diperpanjang oleh Arbiter atau Majelis Arbitrase (Pasal 33 UU Arbitrase).

Penetapan Putusan Arbitrase

Apabila pemeriksaan sengketa telah selesai, pemeriksaan segera ditutup dan ditetapkan hari sidang untuk mengucapkan putusan Arbitrase (Pasal 55 UU Arbitrase). Arbiter atau Majelis Arbitrase mengambil keputusan berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan keadilan dan kepatutan. Putusan diucapkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemeriksaan ditutup (Pasal 57 UU Arbitrase). Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Ketentuan tersebut dimuat dalam Pasal 60 UU Arbitrase.

² Rahmadi Usman, 2002 Usman, *Hukum Arbitrase Nasional*. PT Gramedia, Jakarta, hlm. 57.

Akibat Hukum Penyelesaian Sengketa

Akibat Hukum Putusan Pengadilan Niaga

Berdasarkan UUHKI, terhadap putusan Pengadilan Niaga dapat diajukan suatu upaya hukum. Upaya hukum yang ditentukan dalam UUHKI tersebut adalah berupa kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal putusan dimohonkan kasasi diberitahukan kepada para pihak, maka pihak yang merasa keberatan dapat mengajukan upaya hukum tersebut. Sidang pemeriksaan permohonan kasasi dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal permohonan diterima Mahkamah Agung. Putusan kasasi tersebut ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari pemeriksaan kasasi selesai. Putusan yang tidak dimohonkan kasasi dan memperoleh kekuatan hukum tetap setelah putusan kasasi dicatat oleh Direktorat Jenderal HKI dalam daftar umum HKI dan diumumkan dalam berita resmi HKI tersebut.

Akibat Hukum Putusan Arbitrase

Berdasarkan Pasal 60 UU Arbitrase, putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat pihak-pihak untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, terhadap putusan Arbitrase tidak dapat dilakukan upaya banding, kasasi atau peninjauan kembali. Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembaran asli atau salinan otentik putusan diserahkan dan didaftarkan oleh Arbiter atau kuasanya kepada panitera pengadilan negeri. Penyerahan dan pendaftaran tersebut dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau pinggir putusan oleh panitera pengadilan negeri. Tidak terpenuhinya ketentuan penyerahan berakibat putusan Arbitrase tidak dapat dilaksanakan (Pasal 59 UU Arbitrase). Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan Arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah putusan eksekusi didaftarkan di panitera pengadilan negeri (Pasal 61 UU Arbitrase). Perintah ketua pengadilan negeri ditulis pada lembar asli dan

salinan otentik putusan Arbitrase yang dikeluarkan (Pasal 53 UU Arbitrase). Putusan Arbitrase yang telah dibubuhi perintah ketua pengadilan negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 64 UU Arbitrase).

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Objek sengketa yang dapat diajukan penyelesaian melalui Pengadilan Niaga dan Arbitrase terdapat persamaan yaitu memiliki kewenangan yang sama dalam penyelesaian sengketa di bidang hak kekayaan intelektual sepanjang yang sudah ditentukan dalam UUHKI. Perbedaannya adalah Arbitrase memiliki lingkup bidang yang luas meliputi segala bidang ekonomi yaitu perdagangan, keuangan, industri, perbankan, dan segala sesuatu yang menyangkut hak dari para pihak serta Arbitrase dapat menjadi lembaga penyelesai sengketa jika ditunjuk oleh para pihak berdasarkan klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase. Sedangkan Pengadilan Niaga hanya memiliki kewenangan di bidang HKI dan kepailitan serta penundaan kewajiban pembayaran hutang.

Prosedur penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Niaga dan Arbitrase terdapat perbedaan hal tahapan-tahapan penyelesaian sengketa, jangka waktu, dan putusan. Pada Pengadilan Niaga tahapan dan jangka waktunya lebih singkat meliputi: pengajuan gugatan, pemeriksaan perkara, dan penetapan putusan. Pada Pengadilan Niaga, pemeriksaan dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari, putusan harus sudah diberikan dalam jangka waktu paling 90 (sembilan puluh) hari dan dapat diperpanjang 30 (tiga puluh) hari, salinan putusan harus telah diterima para pihak paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan dibacakan. Sedangkan pada Arbitrase tahapannya cukup banyak dan jangka waktunya relatif panjang, meliputi: permohonan arbitrase, penunjukan Arbiter, penyampaian surat tuntutan, pemeriksaan sengketa, dan penetapan putusan. Jangka waktu pemeriksaan sengketa pada Arbitrase adalah paling lama 180 hari dan masih dapat diperpanjang, putusan diucapkan dalam waktu paling 30 setelah

sidang ditutup, dan putusan harus disampaikan kepada para pihak paling lama 14 hari setelah dibacakan. Perbedaan utama dalam pemeriksaan pada Pengadilan Niaga dan Arbitrase adalah pada cara pemeriksaan sengketa. Pada Pengadilan Niaga sidang dilakukan secara lisan dan dihadiri para pihak yang terkait. Sedangkan pada Arbitrase pemeriksaan sengketa dilakukan secara tertulis, hanya apabila diperlukan sidang dilakukan secara lisan untuk mendengarkan keterangan saksi yang kurang jelas tentang pokok sengketa.

Akibat hukum penyelesaian sengketa pada Pengadilan Niaga dan Arbitrase terdapat perbedaan dari aspek putusan yang ditetapkan. Putusan Pengadilan Niaga merupakan putusan yang masih dimungkinkan dilakukan upaya hukum berupa kasasi dan peninjauan kembali oleh pihak yang dinyatakan kalah dalam putusan tersebut. Jika tidak diajukan upaya hukum dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak dibacakannya putusan maka putusan Pengadilan Niaga tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan untuk putusan Arbitrase tidak disediakan upaya hukum oleh UU Arbitrase. Oleh karena itu, putusan Arbitrase yang ditetapkan oleh Arbiter atau Majelis Arbitrase bersifat final dan mengikat. Pada prinsipnya, persamaan dari ditetapkannya putusan Pengadilan Niaga dan Arbitrase yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah adanya eksekusi yang harus didaftarkan pada pengadilan negeri sehingga memiliki kekuatan tetap untuk dilaksanakan. Dengan demikian, pelaksanaan eksekusi akibat putusan Pengadilan Niaga dan Arbitrase sama-sama harus didaftarkan di pengadilan negeri untuk memperoleh kekuatan pelaksanaan eksekusinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurasyid, Priyatna. 2002. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Fikahati Aneska, Jakarta
- Basah, Sajchran. 1994. *Hukum Tata Negara Perbandingan*. Alumni, Bandung
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta
- Fuady, Munir. 2003. *Arbitrase Nasional*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung

- Gautama, Sudargo. 1992. *Arbitrase Dagang Internasional*. Alumni, Bandung
- Hartono, Sunarjati. 1991. *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Muhammad, Abdulkadir. 1993. *Hukum Perdata Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- . 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Press, Jakarta
- Suparman, Eman. *Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakan Keadilan*. PT Tatanusa, Jakarta
- Usman, Rachmadi. 2002. *Hukum Arbitrase Nasional*. PT Gramedia, Jakarta
- . 2004. *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*. PT Gramedia, Jakarta.